

Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Islam Kontemporer: Analisis Kesetaraan Gender dan Reinterpretasi Teks Keagamaan

Putri Riani^{1✉}, Viani Kornelia², Firda Nazirah³, Ahmadi⁴

¹⁻⁴Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

✉Corresponding email: putri.riani018@gmail.com

Histori Artikel:

Submit: 4 Mei 2026; Revisi: 10 Juni 2026; Diterima: 13 Juni 2026

Publikasi: 16 Juni 2026; Periode Terbit: Juni 2026

Doi: 10.23917/jkk.v5i2.1129

Abstrak

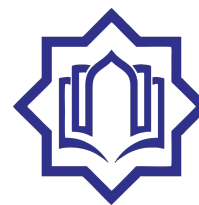
Kepemimpinan perempuan dalam Islam masih menjadi perdebatan yang berkembang di kalangan masyarakat Muslim akibat adanya perbedaan interpretasi terhadap teks-teks keagamaan dan pengaruh budaya patriarki. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kepemimpinan perempuan dalam perspektif Islam kontemporer, mengkaji prinsip kesetaraan gender dalam Islam, serta mengeksplorasi argumentasi dan dinamika sosial yang memengaruhi penerimaan terhadap kepemimpinan perempuan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari berbagai sumber primer dan sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta karya akademik yang membahas kepemimpinan perempuan, feminisme Islam, dan reinterpretasi teks-teks keagamaan. Analisis data dilakukan menggunakan teknik *content analysis* melalui identifikasi dan interpretasi tema-tema utama yang berkaitan dengan kepemimpinan perempuan dalam Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam pada dasarnya menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang setara sebagai hamba Allah Swt. dan khalifah di bumi. Kepemimpinan dalam Islam lebih menekankan aspek kompetensi, integritas, tanggung jawab moral, dan kemaslahatan dibandingkan faktor gender. Pemikiran Islam kontemporer juga menunjukkan adanya reinterpretasi terhadap teks-teks keagamaan yang lebih kontekstual dan inklusif sehingga membuka ruang yang lebih luas bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kepemimpinan publik. Meskipun demikian, budaya patriarki, stereotip gender, dan perbedaan interpretasi agama masih menjadi tantangan dalam penerimaan kepemimpinan perempuan di masyarakat Muslim. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepemimpinan perempuan dalam Islam memiliki legitimasi yang kuat selama didasarkan pada kapasitas, kualitas, dan kemampuan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: kepemimpinan perempuan, Islam kontemporer, kesetaraan gender, feminisme Islam, kepemimpinan dalam Islam.

Pendahuluan

Kepemimpinan merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan sosial yang memiliki peran

strategis dalam mengarahkan, mengorganisasi, serta mencapai tujuan kolektif dalam suatu komunitas. Dalam konteks masyarakat, kepemimpinan



tidak hanya berkaitan dengan kemampuan administratif dan pengambilan keputusan, tetapi juga menyangkut legitimasi moral, tanggung jawab sosial, serta kemampuan membangun keadilan dan kesejahteraan bersama. Dalam perspektif Islam, kepemimpinan dipahami sebagai amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, kejujuran, dan keadilan. Seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab terhadap urusan administratif dan sosial masyarakat, tetapi juga memiliki kewajiban moral untuk menghadirkan kemaslahatan bagi umat. Oleh karena itu, isu kepemimpinan senantiasa menjadi tema penting dalam diskursus sosial-politik Islam, termasuk dalam pembahasan mengenai posisi dan partisipasi perempuan dalam ruang publik serta kepemimpinan (Abou-Bakr, 2015).

Perdebatan mengenai kepemimpinan perempuan dalam Islam berkembang seiring dengan adanya perbedaan interpretasi terhadap teks-teks keagamaan, khususnya ayat Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan. Dalam tradisi tafsir klasik, konsep qiwamah sering dipahami sebagai legitimasi kepemimpinan laki-laki atas perempuan, baik dalam ruang domestik maupun publik. Pemahaman tersebut kemudian memunculkan asumsi bahwa kepemimpinan publik seharusnya didominasi oleh laki-laki. Akan tetapi, perkembangan pemikiran Islam kontemporer menunjukkan adanya transformasi pendekatan interpretatif

yang lebih kontekstual dan historis terhadap teks-teks keagamaan. Abou-Bakr (2015) menegaskan bahwa konsep qiwamah tidak semestinya dipahami sebagai bentuk superioritas mutlak laki-laki, melainkan sebagai tanggung jawab sosial yang bersifat kontekstual dan dapat berubah sesuai dengan dinamika masyarakat.

Perubahan paradigma tersebut mendorong lahirnya diskursus baru mengenai kesetaraan gender dalam Islam. Kemunculan feminisme Islam menjadi salah satu tonggak penting dalam upaya reinterpretasi terhadap ajaran agama yang selama ini dianggap membatasi peran perempuan dalam ruang publik. Feminisme Islam hadir bukan untuk menolak ajaran agama, melainkan untuk menafsirkan kembali sumber-sumber Islam dengan pendekatan yang lebih adil dan egaliter. Badran (2005) menjelaskan bahwa feminisme Islam bertujuan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip kesetaraan gender dengan nilai-nilai Islam melalui reinterpretasi terhadap Al-Qur'an dan hadis. Dalam perspektif ini, perempuan dipandang memiliki hak dan kesempatan yang setara dengan laki-laki dalam bidang sosial, politik, ekonomi, pendidikan, maupun kepemimpinan, selama memiliki kompetensi dan kapasitas yang memadai.

Selain itu, berbagai penelitian kontemporer menunjukkan bahwa Al-Qur'an pada dasarnya memberikan ruang yang luas bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial masyarakat. Barlas (2006) menegaskan bahwa banyak interpretasi



yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat sebenarnya lebih dipengaruhi oleh budaya patriarki daripada substansi ajaran Al-Qur'an itu sendiri. Dengan menggunakan pendekatan hermeneutika yang berorientasi pada keadilan, perempuan dipahami sebagai individu yang memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab sosial yang setara dengan laki-laki (Shafira et al., 2024). Oleh karena itu, kesempatan untuk menjadi pemimpin tidak semestinya dibatasi oleh jenis kelamin, tetapi lebih ditentukan oleh kemampuan individu dalam menjalankan fungsi kepemimpinan secara efektif dan bertanggung jawab.

Dalam konteks masyarakat modern, perempuan telah menunjukkan kapasitas yang signifikan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, ekonomi, politik, pemerintahan, dan organisasi sosial. Banyak perempuan berhasil menduduki posisi strategis dan menunjukkan efektivitas kepemimpinan yang tinggi (Maharani et al., 2024). Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa kualitas kepemimpinan tidak ditentukan oleh gender, melainkan oleh kompetensi, pengalaman, kemampuan manajerial, keterampilan komunikasi, serta kemampuan mengambil keputusan secara bijaksana. Mir-Hosseini (2006) menegaskan bahwa tuntutan terhadap kesetaraan gender dalam masyarakat Islam modern tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, melainkan merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial yang menjadi tujuan utama syariat Islam.

Meskipun demikian, peningkatan

dukungan terhadap kepemimpinan perempuan belum sepenuhnya menghilangkan berbagai hambatan sosial yang masih berkembang di masyarakat Muslim. Budaya patriarki yang mengakar, stereotip gender, serta dominasi interpretasi konservatif terhadap teks-teks keagamaan masih menjadi tantangan utama bagi perempuan untuk memperoleh akses yang setara dalam kepemimpinan (Lutfiyah & Diyanah, 2022). Dalam banyak kasus, perempuan masih menghadapi diskriminasi struktural maupun kultural yang membatasi ruang partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan publik. Moghadam (2003) menyatakan bahwa persoalan kepemimpinan perempuan tidak hanya berkaitan dengan aspek teologis, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, politik, dan historis masyarakat. Oleh sebab itu, kajian mengenai kepemimpinan perempuan dalam Islam memerlukan pendekatan multidisipliner yang mampu mengintegrasikan dimensi normatif keagamaan dengan realitas sosial kontemporer.

Di sisi lain, perkembangan globalisasi, modernisasi pendidikan, serta meningkatnya partisipasi perempuan dalam berbagai sektor publik telah memunculkan kebutuhan baru terhadap reinterpretasi konsep kepemimpinan dalam Islam. Transformasi sosial yang terjadi di masyarakat Muslim menuntut adanya pemahaman keagamaan yang lebih adaptif terhadap prinsip keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia tanpa mengabaikan nilai-nilai fundamental



Islam (Prastio et al., 2021). Dalam konteks ini, kajian mengenai kepemimpinan perempuan menjadi semakin relevan karena tidak hanya menyangkut persoalan gender, tetapi juga berkaitan dengan pembangunan sosial, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat Muslim secara lebih luas.

Meskipun berbagai penelitian mengenai kepemimpinan perempuan dalam Islam telah dilakukan, sebagian besar kajian masih berfokus pada perdebatan normatif antara perspektif konservatif dan progresif. Seperti Musa et al., (2023) telah melakukan penelitian yang secara khusus mengkaji argumentasi intelektual Muslim kontemporer mengenai legitimasi kepemimpinan perempuan dalam konteks masyarakat modern masih relatif terbatas. Selain itu, masih diperlukan kajian yang mampu menghubungkan antara prinsip-prinsip Islam, reinterpretasi teks keagamaan, dan dinamika sosial kontemporer secara lebih komprehensif. Kesenjangan penelitian tersebut menunjukkan pentingnya pengembangan kajian yang tidak hanya berorientasi pada aspek tekstual, tetapi juga mempertimbangkan dimensi historis, sosial, dan kontekstual dalam memahami kepemimpinan perempuan dalam Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji pandangan-pandangan yang mendukung kesetaraan kepemimpinan perempuan dalam Islam serta menganalisis argumentasi para intelektual Muslim modern dalam

memperjuangkan partisipasi perempuan dalam posisi kepemimpinan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperluas pemahaman mengenai hubungan antara prinsip-prinsip Islam, kesetaraan gender, dan kepemimpinan perempuan dalam masyarakat kontemporer. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi referensi ilmiah dalam membangun diskursus Islam yang lebih inklusif, adil, dan relevan dengan perkembangan sosial modern (Badran, 2005; Mir-Hosseini, 2006).

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis dan memahami berbagai konsep, teori, serta pandangan intelektual Muslim kontemporer mengenai kepemimpinan perempuan dalam perspektif Islam. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada eksplorasi makna, interpretasi, dan konstruksi pemikiran yang berkembang dalam diskursus keislaman terkait kesetaraan gender dan kepemimpinan perempuan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai dinamika pemikiran Islam kontemporer dalam merespons isu kepemimpinan perempuan di masyarakat modern.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang mengandalkan berbagai sumber literatur sebagai data utama dalam proses analisis. Penelitian kepustakaan dipilih



karena tema yang dikaji berkaitan dengan pemikiran, interpretasi teks keagamaan, serta argumentasi akademik yang berkembang dalam karya-karya ilmiah mengenai kepemimpinan perempuan dalam Islam (Baharun et al., 2021). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melakukan kajian kritis terhadap berbagai pandangan dan teori yang relevan sehingga dapat menghasilkan analisis yang sistematis dan objektif.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari artikel ilmiah, buku, dan karya akademik yang secara khusus membahas kepemimpinan perempuan, feminisme Islam, kesetaraan gender, serta reinterpretasi teks-teks keagamaan dalam Islam kontemporer. Sumber utama penelitian meliputi karya-karya pemikir Muslim kontemporer seperti Omaima Abou-Bakr, Margot Badran, Asma Barlas, Ziba Mir-Hosseini, dan Valentine M. Moghadam yang secara intensif membahas relasi gender, hak perempuan, serta legitimasi kepemimpinan perempuan dalam perspektif Islam modern (Hartati et al., 2025). Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur pendukung seperti jurnal nasional dan internasional, buku referensi, dokumen ilmiah, prosiding, serta sumber akademik lain yang relevan dengan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai

literatur yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan relevansi tema, kredibilitas akademik, serta kontribusinya terhadap pengembangan kajian mengenai kepemimpinan perempuan dalam Islam. Selanjutnya, data yang telah terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan fokus pembahasan penelitian untuk memudahkan proses analisis secara sistematis.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yaitu dengan mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan mengkategorikan tema-tema utama yang muncul dari berbagai sumber literatur. Proses analisis difokuskan pada beberapa aspek utama, meliputi konsep kepemimpinan dalam Islam, prinsip kesetaraan gender, argumentasi yang mendukung kepemimpinan perempuan, reinterpretasi terhadap teks-teks keagamaan, perspektif Islam kontemporer mengenai perempuan, serta berbagai tantangan sosial dan budaya yang dihadapi perempuan dalam memperoleh posisi kepemimpinan. Melalui teknik analisis isi, penelitian ini berupaya menemukan pola pemikiran, kesamaan argumentasi, serta perbedaan perspektif dari para intelektual Muslim kontemporer terkait isu kepemimpinan perempuan.

Untuk menjamin validitas dan kredibilitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan berbagai informasi, pandangan, dan temuan yang diperoleh



dari sejumlah referensi akademik yang berbeda sehingga dapat menghasilkan interpretasi yang lebih objektif, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selain itu, proses triangulasi juga bertujuan untuk meminimalkan subjektivitas peneliti dalam menafsirkan data serta memperkuat konsistensi hasil penelitian.

Melalui pendekatan metodologis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konstruksi pemikiran Islam kontemporer terhadap kepemimpinan perempuan serta kontribusinya dalam membangun wacana Islam yang lebih inklusif, adil, dan kontekstual terhadap perkembangan masyarakat modern.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diskursus mengenai kepemimpinan perempuan dalam Islam kontemporer mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan munculnya berbagai reinterpretasi terhadap teks-teks keagamaan dan meningkatnya kesadaran mengenai prinsip keadilan serta kesetaraan gender dalam Islam. Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai literatur dan pandangan para intelektual Muslim kontemporer, ditemukan bahwa kepemimpinan dalam Islam pada dasarnya lebih menekankan aspek integritas, kapasitas, tanggung jawab moral, serta kemaslahatan bagi masyarakat dibandingkan faktor gender semata. Selain itu, perkembangan sosial

modern turut mendorong lahirnya pandangan yang lebih kontekstual terhadap posisi perempuan dalam ruang publik dan kepemimpinan.

Pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada empat aspek utama yang saling berkaitan, yaitu konsep kepemimpinan dalam perspektif Islam, prinsip kesetaraan gender dalam Islam, argumentasi dan legitimasi kepemimpinan perempuan dalam Islam kontemporer, serta tantangan sosial dan dinamika penerimaan kepemimpinan perempuan di masyarakat Muslim. Keempat aspek tersebut dianalisis secara komprehensif untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara nilai-nilai Islam, kepemimpinan, dan kesetaraan gender dalam konteks masyarakat kontemporer.

a. Konsep Kepemimpinan dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, kepemimpinan merupakan konsep yang memiliki dimensi spiritual, moral, sosial, dan administratif yang saling berkaitan. Kepemimpinan tidak hanya dipahami sebagai kekuasaan untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, tetapi juga sebagai amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi terciptanya kemaslahatan bersama (Arsal et al., 2020). Konsep kepemimpinan dalam Islam dikenal melalui istilah al-imamah, al-qiyadah, dan khalifah yang semuanya merujuk pada tanggung jawab manusia dalam mengelola kehidupan berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, keadilan, dan



kesejahteraan sosial (Kana et al., 2022). Oleh karena itu, seorang pemimpin dalam Islam tidak hanya dituntut memiliki kemampuan manajerial, tetapi juga integritas moral dan spiritual yang tinggi.

Al-Qur'an menempatkan manusia sebagai khalifah di bumi sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 30. Ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia diberikan tanggung jawab untuk memelihara, mengelola, dan membangun kehidupan di bumi secara bijaksana. Konsep khalifah dalam ayat tersebut tidak dibatasi pada jenis kelamin tertentu, melainkan berlaku bagi seluruh manusia yang memiliki kemampuan untuk menjalankan amanah kepemimpinan (Zakiah & Arifin, 2021). Dengan demikian, kepemimpinan dalam Islam pada hakikatnya berorientasi pada tanggung jawab dan kapasitas individu, bukan semata-mata pada identitas biologis atau gender seseorang.

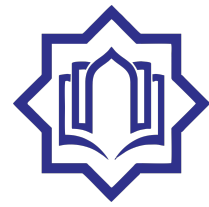
Selain itu, prinsip kepemimpinan dalam Islam juga sangat menekankan aspek keadilan. QS. An-Nisa ayat 58 menegaskan pentingnya menyampaikan amanah kepada yang berhak dan menetapkan hukum secara adil. Ayat

tersebut menjadi landasan utama bahwa legitimasi kepemimpinan dalam Islam harus didasarkan pada kompetensi, integritas, dan kemampuan untuk menegakkan keadilan. Dalam konteks ini, Islam tidak menjadikan gender sebagai syarat mutlak kepemimpinan, melainkan lebih menitikberatkan pada kualitas moral dan profesional seorang pemimpin (Khairunnas et al., 2022).

Kepemimpinan Islam juga tidak dapat dipisahkan dari keteladanan Rasulullah saw. sebagai figur ideal pemimpin. Rasulullah menunjukkan model kepemimpinan yang berlandaskan nilai shiddiq (jujur), amanah (dapat dipercaya), tabligh (mampu menyampaikan kebenaran), dan fathanah (cerdas). Keempat karakter tersebut menjadi fondasi utama dalam membangun kepemimpinan yang efektif dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Dalam praktiknya, Rasulullah tidak hanya memimpin dalam aspek keagamaan, tetapi juga dalam bidang sosial, politik, pendidikan, dan ekonomi (Khairi et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Islam memiliki cakupan yang luas dan bersifat multidimensional.

Tabel 1. Nilai-Nilai Dasar Kepemimpinan dalam Perspektif Islam

No	Nilai Kepemimpinan	Makna dalam Islam	Implementasi dalam Kepemimpinan
1	Shiddiq	Kejujuran dan integritas moral	Bersikap transparan dan jujur dalam pengambilan keputusan
2	Amanah	Tanggung jawab dan dapat dipercaya	Menjalankan tugas secara adil dan profesional
3	Tabligh	Kemampuan menyampaikan kebenaran	Membangun komunikasi yang terbuka dan edukatif
4	Fathanah	Kecerdasan dan kebijaksanaan	Menyusun kebijakan berdasarkan pertimbangan rasional



No	Nilai Kepemimpinan	Makna dalam Islam	Implementasi dalam Kepemimpinan
5	Adil	Menempatkan sesuatu secara proporsional	Tidak diskriminatif dalam memimpin masyarakat

Tabel 1 menunjukkan bahwa konsep kepemimpinan dalam Islam dibangun di atas nilai-nilai moral dan etika yang kuat. Nilai shiddiq menekankan pentingnya kejujuran dan integritas sebagai dasar utama kepemimpinan. Pemimpin yang jujur akan memperoleh legitimasi sosial dari masyarakat karena dianggap mampu menjalankan amanah secara benar (Zahra, 2020). Dalam konteks modern, transparansi dan akuntabilitas menjadi bagian penting dari implementasi nilai shiddiq dalam tata kelola organisasi maupun pemerintahan.

Nilai amanah menegaskan bahwa kepemimpinan merupakan tanggung jawab besar yang harus dipertanggungjawabkan, baik di hadapan manusia maupun Allah Swt. Menurut Budiarta (2022), seorang pemimpin tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Oleh sebab itu, konsep amanah dalam Islam memiliki keterkaitan erat dengan prinsip *good governance* dan kepemimpinan etis dalam masyarakat modern.

Sementara itu, *tabligh* menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus mampu menyampaikan informasi, kebijakan, dan kebenaran secara terbuka kepada masyarakat. Komunikasi yang efektif menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan kepemimpinan karena dapat membangun kepercayaan

publik serta meminimalkan konflik sosial (Da Meisa & Anzari, 2021). Di sisi lain, *fathanah* menggambarkan pentingnya kecerdasan intelektual dan kemampuan berpikir strategis dalam menghadapi berbagai tantangan sosial yang kompleks.

Nilai keadilan juga menjadi inti utama kepemimpinan Islam. Pemimpin dituntut untuk bersikap objektif, tidak diskriminatif, dan mampu memberikan hak kepada setiap individu secara proporsional. Dalam konteks kepemimpinan perempuan, prinsip keadilan ini menjadi landasan penting bahwa peluang kepemimpinan semestinya diberikan berdasarkan kompetensi dan kapasitas, bukan semata-mata berdasarkan gender (Aliyah & Aulia, 2022).

Konsep kepemimpinan Islam juga berkembang dalam bidang pendidikan. Kepemimpinan pendidikan Islam dipahami sebagai kemampuan memimpin lembaga pendidikan berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan membentuk manusia berakhlak mulia dan berilmu. Affandi et al. (2022) menjelaskan bahwa kepemimpinan pendidikan Islam berorientasi pada pengembangan potensi manusia secara holistik, baik intelektual, spiritual, maupun moral. Oleh karena itu, pemimpin pendidikan Islam tidak hanya bertugas mengelola administrasi lembaga, tetapi juga menjadi teladan dalam pembentukan



karakter peserta didik.

Tabel 2. Karakteristik Kepemimpinan Pendidikan Islam

No	Karakteristik	Deskripsi	Dampak dalam Pendidikan
1	Spiritual	Berlandaskan nilai-nilai Islam	Membentuk budaya religius di sekolah
2	Moral	Menjadi teladan akhlak	Meningkatkan karakter peserta didik
3	Profesional	Memiliki kompetensi manajerial	Meningkatkan efektivitas pengelolaan lembaga
4	Humanis	Mengedepankan pendekatan kemanusiaan	Membangun hubungan harmonis
5	Visioner	Memiliki orientasi masa depan	Mengembangkan inovasi pendidikan

Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa kepemimpinan pendidikan Islam memiliki karakteristik yang bersifat integratif antara dimensi spiritual dan profesional. Aspek spiritual menjadi fondasi utama karena seluruh aktivitas pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia yang bertakwa dan berakhlak mulia (Rahmatunnur et al., 2023). Dalam praktiknya, pemimpin pendidikan Islam tidak hanya bertugas menjalankan fungsi administratif, tetapi juga membangun kultur pendidikan yang religius dan berorientasi pada pembentukan karakter.

Karakter moral menjadi aspek penting lainnya karena pemimpin pendidikan dipandang sebagai role model bagi peserta didik maupun tenaga pendidik. Keteladanan dalam sikap, perilaku, dan pengambilan keputusan memiliki pengaruh besar terhadap kualitas budaya organisasi pendidikan (Siahaan et al., 2024). Selain itu, profesionalisme juga menjadi tuntutan penting dalam kepemimpinan modern. Pemimpin pendidikan harus memiliki kemampuan manajerial, perencanaan

strategis, serta kemampuan menyelesaikan masalah secara efektif.

Karakter humanis menunjukkan bahwa kepemimpinan pendidikan Islam mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, empati, dan penghargaan terhadap individu. Menurut Latifah & Asy'ari (2024) pendekatan ini penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan inklusif. Sementara itu, sifat visioner menunjukkan bahwa pemimpin pendidikan Islam harus mampu membaca perkembangan zaman dan melakukan inovasi agar lembaga pendidikan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Dalam konteks sosial kontemporer, konsep kepemimpinan Islam juga mengalami perkembangan yang lebih inklusif. Banyak cendekiawan Muslim modern mulai menekankan bahwa kepemimpinan harus dilihat dari aspek kompetensi dan manfaat sosial yang dihasilkan (Nurcahyani et al., 2024). Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan patriarkal menuju pendekatan yang lebih berbasis kapasitas individu.



Tabel 3. Perspektif Kepemimpinan Islam Tradisional dan Kontemporer

Aspek	Perspektif Tradisional	Perspektif Kontemporer	Implikasi
Dasar Kepemimpinan	Dominasi laki-laki	Kompetensi dan integritas	Membuka peluang kepemimpinan lebih luas
Interpretasi Teks	Literal	Kontekstual dan historis	Pemahaman lebih adaptif
Peran Perempuan	Terbatas pada domestik	Aktif di ruang publik	Meningkatkan partisipasi sosial perempuan
Fokus Kepemimpinan	Otoritas	Pelayanan dan keadilan	Kepemimpinan lebih humanis
Orientasi Sosial	Hierarkis	Kolaboratif dan inklusif	Memperkuat kesetaraan sosial

Tabel 3 memperlihatkan adanya transformasi pemikiran mengenai kepemimpinan dalam Islam dari perspektif tradisional menuju pendekatan kontemporer yang lebih kontekstual dan inklusif. Dalam perspektif tradisional, kepemimpinan sering kali dipahami secara hierarkis dan didominasi oleh laki-laki berdasarkan interpretasi literal terhadap teks keagamaan. Akan tetapi, perkembangan pemikiran Islam modern menghadirkan pendekatan baru yang lebih menekankan kompetensi, integritas, dan kemaslahatan sosial sebagai dasar utama kepemimpinan.

Pendekatan kontemporer memandang bahwa teks-teks keagamaan perlu dipahami sesuai dengan konteks historis dan sosial ketika teks tersebut diturunkan. Dengan pendekatan ini, perempuan memperoleh ruang yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik, termasuk dalam bidang kepemimpinan. Pergeseran paradigma tersebut menunjukkan bahwa Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons perubahan sosial selama tetap berorientasi pada

nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan (Rumahorbo et al., 2021).

Selain itu, transformasi konsep kepemimpinan juga memperlihatkan perubahan orientasi dari model kepemimpinan berbasis otoritas menuju kepemimpinan yang lebih humanis dan kolaboratif. Pemimpin tidak lagi dipandang sebagai figur dominan yang harus ditaati secara mutlak, tetapi sebagai pelayan masyarakat yang bertugas menciptakan kesejahteraan bersama (Chairunnisa, 2022). Dalam konteks ini, kepemimpinan perempuan mulai diterima sebagai bagian dari dinamika sosial modern yang sejalan dengan prinsip-prinsip universal Islam tentang keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan umat.

b. Prinsip Kesetaraan Gender dalam Islam

Prinsip kesetaraan gender dalam Islam merupakan salah satu tema penting dalam diskursus pemikiran Islam kontemporer, khususnya dalam kaitannya dengan hak sosial, partisipasi publik, dan kepemimpinan perempuan. Islam pada dasarnya menempatkan laki-



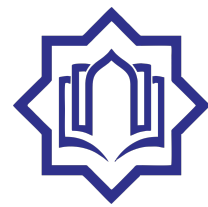
laki dan perempuan sebagai makhluk Allah Swt. yang memiliki kedudukan spiritual yang sama serta sama-sama memikul tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi (Famelasari & Prastiwi, 2021). Kesetaraan tersebut tercermin dalam berbagai ayat Al-Qur'an yang menegaskan bahwa ukuran kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh ketakwaan, amal saleh, dan kontribusi positif terhadap masyarakat. Oleh karena itu, konsep kesetaraan dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai persamaan hak secara normatif, tetapi juga mencakup kesempatan yang adil bagi setiap individu untuk berkembang dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial.

Salah satu ayat yang sering dijadikan landasan utama mengenai prinsip kesetaraan dalam Islam adalah QS. Al-Hujurat ayat 13 yang menjelaskan bahwa manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal, dan yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak menjadikan jenis kelamin sebagai dasar superioritas seseorang. Dengan demikian, laki-laki dan perempuan memiliki peluang yang sama untuk memperoleh penghargaan sosial maupun spiritual berdasarkan kualitas moral dan amal yang dilakukan (Saeful, 2021).

Selain itu, QS. At-Taubah ayat 71

juga menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan yang beriman merupakan penolong satu sama lain dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ayat tersebut memperlihatkan adanya hubungan kemitraan antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan membangun kehidupan masyarakat yang baik. Dalam konteks modern, ayat ini sering dijadikan dasar argumentasi bahwa perempuan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam ruang publik, termasuk dalam bidang pendidikan, ekonomi, politik, dan kepemimpinan (Surahman & Munadi, 2022).

Pandangan mengenai kesetaraan gender dalam Islam juga berkembang melalui reinterpretasi teks-teks keagamaan oleh para intelektual Muslim kontemporer. Barlas (2006) menegaskan bahwa subordinasi perempuan dalam sebagian masyarakat Muslim lebih banyak dipengaruhi oleh budaya patriarki dibandingkan oleh substansi ajaran Al-Qur'an itu sendiri. Menurutnya, Al-Qur'an pada dasarnya membawa prinsip keadilan dan kesetaraan manusia tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, interpretasi terhadap teks agama harus dilakukan secara kontekstual dan mempertimbangkan nilai-nilai universal Islam seperti keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan.



Tabel 4. Prinsip Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam

No	Prinsip	Dasar Al-Qur'an	Implikasi Sosial
1	Kesetaraan Spiritual	QS. Al-Hujurat: 13	Kemuliaan berdasarkan ketakwaan
2	Kesetaraan Amal	QS. An-Nahl: 97	Laki-laki dan perempuan mendapat balasan setara
3	Kemitraan Sosial	QS. At-Taubah: 71	Kerja sama dalam membangun masyarakat
4	Hak Pendidikan	Hadis tentang kewajiban menuntut ilmu	Kesempatan pendidikan bagi semua
5	Tanggung Jawab Sosial	Konsep khalifah	Partisipasi aktif dalam kehidupan publik

Tabel 4 menunjukkan bahwa prinsip kesetaraan gender dalam Islam memiliki dasar normatif yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis. Kesetaraan spiritual menjadi landasan utama bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah Swt. Dalam Islam, kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh jenis kelamin, ras, maupun status sosial, melainkan oleh kualitas ketakwaan dan amal saleh. Prinsip ini memperlihatkan bahwa Islam menolak diskriminasi berbasis gender dalam aspek spiritual maupun moral (Aulia, 2023).

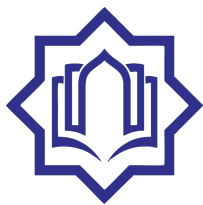
Selain itu, kesetaraan amal menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk melakukan kebaikan dan mendapatkan pahala atas amal yang dilakukan. QS. An-Nahl ayat 97 menjelaskan bahwa siapa saja yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, akan memperoleh kehidupan yang baik dan balasan yang setimpal. Ayat ini memperkuat argumentasi bahwa Islam memberikan pengakuan yang setara terhadap kontribusi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan.

Prinsip kemitraan sosial juga

menjadi elemen penting dalam relasi gender dalam Islam. Laki-laki dan perempuan dipandang sebagai mitra yang saling mendukung dalam menciptakan kehidupan sosial yang harmonis (Abou-Bakr, 2015). Dalam konteks modern, prinsip ini memberikan legitimasi terhadap keterlibatan perempuan dalam aktivitas sosial, politik, ekonomi, dan pendidikan. Hak pendidikan yang diberikan kepada perempuan juga menunjukkan bahwa Islam mendorong pengembangan kapasitas intelektual tanpa membedakan gender.

Di sisi lain, konsep khalifah memperlihatkan bahwa tanggung jawab sosial tidak hanya dibebankan kepada laki-laki, tetapi juga perempuan. Keduanya memiliki peran penting dalam menjaga dan membangun kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera (Mir-Hosseini, 2006). Dengan demikian, prinsip kesetaraan gender dalam Islam pada hakikatnya bersifat komprehensif dan mencakup dimensi spiritual, sosial, intelektual, dan kemanusiaan.

Meskipun Islam mengajarkan prinsip kesetaraan, dalam praktik sosial masih terdapat berbagai interpretasi yang memengaruhi posisi perempuan



dalam masyarakat Muslim. Sebagian kelompok memahami relasi gender secara hierarkis berdasarkan interpretasi literal terhadap konsep qiwamah, sedangkan kelompok lain mengembangkan pendekatan kontekstual yang lebih menekankan nilai keadilan dan kemitraan.

Tabel 5. Perbedaan Perspektif Relasi Gender dalam Islam

Aspek	Perspektif Tradisional	Perspektif Kontemporer	Dampak terhadap Perempuan
Konsep Qiwamah	Dominasi laki-laki	Tanggung jawab sosial	Perluasan ruang publik perempuan
Peran Perempuan	Domestik	Domestik dan publik	Peningkatan partisipasi sosial
Interpretasi Teks	Literal	Kontekstual	Pemahaman lebih inklusif
Kepemimpinan	Terbatas untuk laki-laki	Berdasarkan kompetensi	Kesempatan kepemimpinan lebih terbuka
Pendidikan	Tidak menjadi prioritas utama	Hak universal	Peningkatan akses pendidikan perempuan

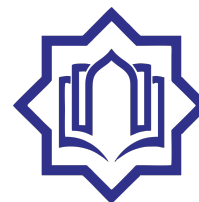
Berdasarkan Tabel 5, terlihat adanya transformasi pemikiran mengenai relasi gender dalam Islam. Perspektif tradisional cenderung menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan dalam struktur sosial berdasarkan interpretasi literal terhadap teks keagamaan (Moghadam, 2002). Dalam pandangan ini, perempuan lebih diarahkan pada peran domestik dan memiliki keterbatasan dalam partisipasi publik. Akan tetapi, perkembangan pemikiran Islam kontemporer menghadirkan pendekatan yang lebih kontekstual dan mempertimbangkan perubahan sosial masyarakat modern.

Konsep qiwamah misalnya, dalam perspektif kontemporer tidak lagi dipahami sebagai legitimasi superioritas laki-laki, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dalam keluarga dan masyarakat (Muslimah, 2021). Pemahaman ini membuka ruang yang lebih luas bagi perempuan untuk berkontribusi dalam bidang publik tanpa

dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Perubahan paradigma juga terlihat dalam aspek pendidikan dan kepemimpinan. Perempuan modern memperoleh akses pendidikan yang lebih luas sehingga memiliki kompetensi yang setara dengan laki-laki dalam berbagai bidang profesional (Al Ahsani, 2020). Oleh karena itu, pembatasan kepemimpinan berdasarkan gender mulai dipandang kurang relevan dalam masyarakat kontemporer. Pendekatan kontekstual terhadap teks agama memungkinkan lahirnya interpretasi yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Dalam konteks sosial modern, prinsip kesetaraan gender dalam Islam juga memiliki relevansi yang kuat terhadap pembangunan masyarakat. Keterlibatan perempuan dalam berbagai sektor publik memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan



sosial (Putri et al., 2024). Banyak negara Muslim mulai menunjukkan peningkatan partisipasi perempuan

dalam bidang pemerintahan, akademik, bisnis, dan organisasi sosial.

Tabel 6. Kontribusi Perempuan dalam Kehidupan Sosial Kontemporer

Bidang	Bentuk Kontribusi	Dampak Sosial	Relevansi dengan Prinsip Islam
Pendidikan	Guru, dosen, akademisi	Peningkatan kualitas SDM	Menuntut ilmu sebagai kewajiban
Ekonomi	Pengusaha dan profesional	Peningkatan kesejahteraan keluarga	Prinsip kerja dan produktivitas
Politik	Legislator dan pemimpin publik	Representasi kepentingan masyarakat	Keadilan sosial
Sosial	Aktifis dan pekerja sosial	Pemberdayaan masyarakat	Amar ma'ruf nahi munkar
Keagamaan	Ulama dan pendidik Islam	Penyebaran ilmu agama	Dakwah dan pendidikan umat

Tabel 6 memperlihatkan bahwa perempuan memiliki kontribusi besar dalam berbagai sektor kehidupan modern. Dalam bidang pendidikan, perempuan berperan penting sebagai pendidik, akademisi, dan peneliti yang membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Balkis, 2020). Peran tersebut sejalan dengan prinsip Islam yang menempatkan menuntut ilmu sebagai kewajiban bagi setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan.

Di bidang ekonomi, perempuan juga menunjukkan kapasitas yang tinggi sebagai pengusaha, profesional, maupun pekerja kreatif yang berkontribusi terhadap kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi perempuan tidak bertentangan dengan ajaran Islam selama dilakukan secara etis dan bertanggung jawab.

Partisipasi perempuan dalam politik dan organisasi sosial turut memperkuat representasi kepentingan

masyarakat secara lebih inklusif. Kehadiran perempuan dalam proses pengambilan keputusan dapat memberikan perspektif yang lebih luas terhadap berbagai persoalan sosial (Kyra & Winduwati, 2024). Selain itu, perempuan juga berperan aktif dalam dakwah, pendidikan agama, dan pemberdayaan masyarakat yang merupakan bagian dari implementasi amar ma'ruf nahi munkar.

Dengan demikian, prinsip kesetaraan gender dalam Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki implikasi nyata dalam kehidupan sosial kontemporer. Islam pada dasarnya memberikan ruang yang luas bagi perempuan untuk berkembang dan berkontribusi dalam masyarakat selama tetap berlandaskan pada nilai-nilai moral, tanggung jawab, dan kemaslahatan bersama.

c. Argumentasi dan Legitimasi Kepemimpinan Perempuan dalam Islam Kontemporer



Perkembangan pemikiran Islam kontemporer menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam memahami posisi perempuan dalam ruang publik, termasuk dalam bidang kepemimpinan. Jika pada masa sebelumnya kepemimpinan perempuan sering diperdebatkan berdasarkan pendekatan tekstual dan tradisional, maka dalam diskursus Islam modern muncul berbagai argumentasi yang lebih kontekstual, rasional, dan berorientasi pada prinsip keadilan sosial. Para intelektual Muslim kontemporer mulai menempatkan kompetensi, integritas, kapasitas intelektual, serta kemaslahatan masyarakat sebagai dasar utama legitimasi kepemimpinan, bukan semata-mata berdasarkan jenis kelamin (Barlas, 2006).

Pandangan tersebut berkembang melalui reinterpretasi terhadap teks-teks keagamaan yang selama ini dianggap membatasi perempuan dalam kepemimpinan. Banyak cendekiawan Muslim modern menilai bahwa sebagian interpretasi klasik lebih dipengaruhi oleh budaya patriarki dan struktur sosial pada masa lampau daripada substansi universal ajaran Islam. Badran (2005) menjelaskan bahwa feminisme Islam hadir sebagai upaya untuk merekonstruksi pemahaman keagamaan yang lebih adil terhadap perempuan melalui pendekatan hermeneutika dan

reinterpretasi terhadap Al-Qur'an serta hadis. Dalam konteks ini, perempuan dipandang sebagai subjek aktif yang memiliki hak sosial, intelektual, dan politik yang setara dengan laki-laki.

Selain itu, Abou-Bakr (2015) menegaskan bahwa konsep *qiwamah* tidak seharusnya dipahami sebagai legitimasi superioritas laki-laki atas perempuan, melainkan sebagai tanggung jawab sosial yang bersifat kontekstual. Dengan demikian, kepemimpinan tidak dapat dibatasi hanya pada laki-laki apabila perempuan memiliki kemampuan, kompetensi, dan integritas yang memadai. Pendekatan ini menunjukkan adanya transformasi pemikiran Islam yang lebih adaptif terhadap perkembangan masyarakat modern dan tuntutan kesetaraan sosial.

Argumentasi mengenai legitimasi kepemimpinan perempuan juga diperkuat oleh prinsip-prinsip universal Islam seperti keadilan, kemaslahatan, dan persamaan hak manusia di hadapan Allah Swt. Islam tidak memberikan ukuran kemuliaan berdasarkan gender, melainkan berdasarkan ketakwaan dan kontribusi sosial seseorang. Oleh karena itu, perempuan yang memiliki kualitas kepemimpinan dan mampu membawa manfaat bagi masyarakat pada dasarnya memiliki legitimasi untuk menduduki posisi kepemimpinan.

Tabel 7. Dasar Argumentasi Kepemimpinan Perempuan dalam Islam Kontemporer

No	Argumentasi	Dasar Pemikiran	Implikasi
1	Kompetensi lebih utama daripada gender	Prinsip keadilan Islam	Kepemimpinan berbasis kapasitas
2	Reinterpretasi teks keagamaan	Pendekatan kontekstual	Pemahaman lebih inklusif



No	Argumentasi	Dasar Pemikiran	Implikasi
3	Kesetaraan manusia di hadapan Allah	QS. Al-Hujurat: 13	Kesempatan yang sama
4	Maqashid al-syariah	Kemaslahatan masyarakat	Kepemimpinan berorientasi manfaat
5	Perubahan sosial modern	Peningkatan pendidikan perempuan	Partisipasi publik lebih luas

Tabel 7 menunjukkan bahwa legitimasi kepemimpinan perempuan dalam Islam kontemporer dibangun di atas argumentasi normatif, kontekstual, dan sosial yang saling berkaitan. Kompetensi menjadi salah satu dasar utama dalam menentukan kelayakan seseorang menjadi pemimpin (Famelasari & Prastiwi, 2021). Dalam perspektif ini, Islam dipandang sebagai agama yang mengedepankan keadilan dan profesionalisme sehingga kesempatan kepemimpinan seharusnya diberikan kepada individu yang memiliki kemampuan terbaik tanpa diskriminasi gender.

Pendekatan reinterpretasi terhadap teks keagamaan juga memainkan peran penting dalam membangun argumentasi tersebut. Para intelektual Muslim modern menilai bahwa teks-teks agama harus dipahami sesuai konteks historis, sosial, dan tujuan utama syariat Islam (Latifah & Asy'ari, 2024). Dengan pendekatan ini, ayat maupun hadis yang sebelumnya dipahami sebagai pembatasan terhadap perempuan dapat ditafsirkan secara lebih kontekstual dan tidak diskriminatif.

Prinsip kesetaraan manusia di hadapan Allah juga memperkuat legitimasi kepemimpinan perempuan. Islam menegaskan bahwa seluruh manusia memiliki hak dan tanggung

jawab yang sama dalam membangun masyarakat. Oleh sebab itu, kesempatan perempuan untuk menjadi pemimpin dipandang sebagai bagian dari implementasi nilai keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Konsep maqashid al-syariah semakin mempertegas bahwa tujuan utama syariat Islam adalah menghadirkan kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat (Nurchayani et al., 2024). Apabila perempuan memiliki kapasitas untuk membawa kemajuan sosial, maka memberikan ruang kepemimpinan kepada perempuan dianggap sesuai dengan tujuan syariat itu sendiri. Selain itu, perkembangan sosial modern yang ditandai dengan meningkatnya pendidikan dan profesionalisme perempuan turut memperkuat argumentasi mengenai pentingnya partisipasi perempuan dalam kepemimpinan publik.

Sejarah Islam sendiri memperlihatkan banyak contoh perempuan yang memiliki kapasitas intelektual dan kepemimpinan yang kuat. Tokoh-tokoh perempuan pada masa awal Islam menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya berperan dalam ruang domestik, tetapi juga dalam bidang ekonomi, pendidikan, sosial,



bahkan politik.

Tabel 8. Tokoh Perempuan dalam Sejarah Islam dan Kontribusinya

Tokoh	Bidang Kontribusi	Bentuk Kepemimpinan	Relevansi Kontemporer
Khadijah binti Khuwailid	Ekonomi dan sosial	Pemimpin bisnis dan pendukung dakwah	Kepemimpinan perempuan di bidang ekonomi
Aisyah ra.	Pendidikan dan keilmuan	Ulama dan periwayat hadis	Kepemimpinan intelektual perempuan
Ummu Salamah	Politik dan diplomasi	Pemberi nasihat strategis	Partisipasi perempuan dalam kebijakan
Asma binti Abu Bakar	Sosial dan perjuangan Islam	Dukungan logistik dan sosial	Peran perempuan dalam perubahan sosial
Ratu Balqis	Pemerintahan	Pemimpin kerajaan	Kepemimpinan politik perempuan

Berdasarkan Tabel 8, terlihat bahwa sejarah Islam memberikan ruang yang cukup luas bagi perempuan untuk berkontribusi dalam berbagai bidang kehidupan. Menurut Chairunnisa (2022), Khadijah binti Khuwailid merupakan contoh perempuan sukses dalam bidang ekonomi yang memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan bisnis yang tinggi. Dukungan Khadijah terhadap dakwah Rasulullah saw. menjadi faktor penting dalam perkembangan Islam pada masa awal.

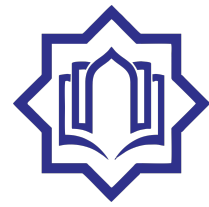
Aisyah RA. juga dikenal sebagai salah satu ulama perempuan yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan Islam. Banyak sahabat dan generasi setelahnya menjadikan Aisyah sebagai rujukan dalam berbagai persoalan agama. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas intelektual yang diakui dalam tradisi Islam (Zahra, 2020).

Selain itu, Ummu Salamah dikenal sebagai sosok yang memiliki kemampuan diplomasi dan pemikiran strategis dalam berbagai situasi penting. Perannya dalam memberikan nasihat

kepada Rasulullah menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki kontribusi dalam pengambilan keputusan politik dan sosial (Rumahorbo et al., 2021). Kisah Ratu Balqis dalam Al-Qur'an juga sering dijadikan contoh bahwa perempuan dapat menjadi pemimpin politik yang bijaksana dan mampu membawa kemajuan bagi masyarakatnya.

Keberadaan tokoh-tokoh tersebut memperlihatkan bahwa Islam secara historis tidak menutup ruang kepemimpinan perempuan. Sebaliknya, perempuan yang memiliki kemampuan dan integritas diberikan ruang untuk berkontribusi dalam kehidupan sosial. Dalam konteks kontemporer, kisah-kisah tersebut menjadi dasar penting dalam memperkuat legitimasi perempuan untuk berpartisipasi dalam kepemimpinan modern (Putri et al., 2024).

Di sisi lain, perkembangan pemikiran Islam kontemporer juga melahirkan berbagai pendekatan baru dalam memahami hadis dan teks keagamaan yang berkaitan dengan



kepemimpinan perempuan. Salah satu hadis yang sering diperdebatkan adalah hadis yang menyatakan bahwa suatu kaum tidak akan beruntung apabila menyerahkan urusan mereka kepada perempuan (Kyra & Winduwati, 2024).

Para intelektual Muslim modern menilai bahwa hadis tersebut harus dipahami berdasarkan konteks historis ketika Rasulullah saw. mengomentari kondisi politik Kerajaan Persia pada masa itu.

Tabel 9. Pendekatan Interpretasi terhadap Kepemimpinan Perempuan

Aspek	Pendekatan Tradisional	Pendekatan Kontemporer	Dampak Interpretasi
Pemahaman Hadis	Literal	Kontekstual-historis	Interpretasi lebih fleksibel
Posisi Perempuan	Terbatas	Setara dalam kapasitas sosial	Perluasan ruang publik
Dasar Kepemimpinan	Gender	Kompetensi dan manfaat sosial	Kepemimpinan inklusif
Tujuan Syariat	Kepatuhan formal	Keadilan dan kemaslahatan	Adaptif terhadap perkembangan zaman
Relasi Gender	Hierarkis	Kemitraan sosial	Kesetaraan partisipasi

Tabel 9 memperlihatkan adanya perbedaan mendasar antara pendekatan tradisional dan kontemporer dalam memahami kepemimpinan perempuan dalam Islam. Pendekatan tradisional cenderung memahami teks keagamaan secara literal dan menjadikan gender sebagai dasar utama dalam menentukan legitimasi kepemimpinan. Akibatnya, perempuan sering kali ditempatkan dalam posisi subordinat dan memiliki keterbatasan dalam ruang publik.

Sebaliknya, pendekatan kontemporer menggunakan metode interpretasi yang lebih kontekstual dan historis. Para cendekiawan modern berusaha memahami latar belakang sosial, politik, dan budaya ketika teks keagamaan diturunkan sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih adaptif terhadap perkembangan masyarakat modern (Khairunnas et al., 2022). Pendekatan ini memungkinkan lahirnya interpretasi yang lebih inklusif

terhadap perempuan dalam bidang kepemimpinan.

Selain itu, perubahan orientasi tujuan syariat dari kepatuhan formal menuju pencapaian keadilan dan kemaslahatan juga memperkuat legitimasi kepemimpinan perempuan. Islam dipahami sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh manusia sehingga interpretasi terhadap teks agama harus mampu menghadirkan manfaat sosial yang luas (Siahaan et al., 2024). Oleh karena itu, kepemimpinan perempuan dalam Islam kontemporer tidak lagi dipandang sebagai penyimpangan, melainkan sebagai bagian dari dinamika sosial yang selaras dengan nilai-nilai universal Islam mengenai keadilan, tanggung jawab, dan kesejahteraan masyarakat.

d. Tantangan Sosial dan Dinamika Penerimaan Kepemimpinan Perempuan



Meskipun perkembangan pemikiran Islam kontemporer menunjukkan dukungan yang semakin kuat terhadap kepemimpinan perempuan, realitas sosial di berbagai masyarakat Muslim masih memperlihatkan adanya beragam tantangan dalam penerimaan perempuan sebagai pemimpin. Tantangan tersebut tidak hanya berasal dari interpretasi keagamaan yang berbeda, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, politik, dan historis yang telah berkembang dalam masyarakat selama bertahun-tahun (Affandi et al., 2022). Dalam banyak kasus, perempuan masih menghadapi hambatan struktural maupun kultural yang membatasi partisipasi mereka dalam ruang publik dan posisi strategis kepemimpinan.

Budaya patriarki menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi rendahnya penerimaan terhadap kepemimpinan perempuan. Sistem patriarki menempatkan laki-laki sebagai pihak yang dominan dalam struktur sosial, sementara perempuan lebih diarahkan pada peran domestik seperti mengurus rumah tangga dan keluarga (Surahman & Munadi, 2022). Akibatnya, perempuan sering dianggap kurang memiliki otoritas untuk memimpin dalam bidang politik, pemerintahan, pendidikan, maupun organisasi sosial. Moghadam (2003) menjelaskan bahwa persoalan kepemimpinan perempuan dalam masyarakat Muslim tidak dapat dilepaskan dari konstruksi sosial dan

budaya patriarki yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat.

Selain budaya patriarki, stereotip gender juga menjadi tantangan serius bagi perempuan dalam memperoleh legitimasi sosial sebagai pemimpin. Perempuan sering diasosiasikan dengan karakter emosional, kurang tegas, dan tidak rasional dibandingkan laki-laki. Stereotip tersebut menyebabkan perempuan kerap diragukan kemampuannya dalam mengambil keputusan strategis, mengelola konflik, maupun memimpin organisasi besar (Arsal et al., 2020). Padahal, berbagai penelitian dan pengalaman empiris menunjukkan bahwa efektivitas kepemimpinan lebih dipengaruhi oleh kompetensi, integritas, keterampilan komunikasi, dan pengalaman seseorang daripada jenis kelamin.

Perbedaan interpretasi terhadap teks-teks keagamaan juga turut memengaruhi dinamika penerimaan kepemimpinan perempuan. Sebagian kelompok Muslim masih memahami ayat dan hadis tertentu secara literal sehingga memandang kepemimpinan sebagai domain laki-laki (Saeful, 2021). Di sisi lain, kelompok progresif menggunakan pendekatan kontekstual yang lebih menekankan nilai keadilan, kemaslahatan, dan kesetaraan manusia dalam Islam. Perbedaan pendekatan interpretatif tersebut menyebabkan munculnya beragam pandangan dalam masyarakat terkait legitimasi perempuan dalam kepemimpinan publik.



Tabel 10. Faktor-Faktor Tantangan Kepemimpinan Perempuan dalam Masyarakat Muslim

No	Faktor Tantangan	Bentuk Hambatan	Dampak terhadap Perempuan
1	Budaya patriarki	Dominasi laki-laki dalam struktur sosial	Keterbatasan akses kepemimpinan
2	Stereotip gender	Anggapan perempuan kurang tegas	Rendahnya kepercayaan publik
3	Interpretasi tekstual agama	Pemahaman literal terhadap teks	Pembatasan peran publik perempuan
4	Ketimpangan pendidikan	Akses pendidikan yang tidak merata	Rendahnya kompetensi profesional
5	Struktur sosial-politik	Minimnya representasi perempuan	Terbatasnya pengaruh dalam kebijakan

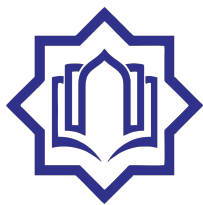
Tabel 10 menunjukkan bahwa tantangan terhadap kepemimpinan perempuan bersifat multidimensional dan saling berkaitan antara aspek budaya, sosial, pendidikan, dan keagamaan. Budaya patriarki menjadi hambatan paling dominan karena menciptakan struktur sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang dianggap lebih layak memimpin (Rahmatunnur et al., 2023). Dalam masyarakat yang masih sangat patriarkal, perempuan sering mengalami marginalisasi dan tidak memperoleh kesempatan yang setara untuk berkembang dalam bidang publik.

Stereotip gender juga memperkuat diskriminasi terhadap perempuan dalam kepemimpinan. Anggapan bahwa perempuan lebih emosional dan kurang rasional dibandingkan laki-laki menyebabkan perempuan sering dipandang tidak cocok menduduki posisi strategis. Padahal, kemampuan kepemimpinan sesungguhnya ditentukan oleh kualitas individu, pengalaman, serta kapasitas profesional yang dimiliki seseorang (Al Ahsani, 2020). Dalam konteks modern, banyak perempuan telah membuktikan

kemampuan mereka dalam memimpin organisasi, institusi pendidikan, perusahaan, bahkan pemerintahan.

Selain itu, interpretasi tekstual terhadap ajaran agama sering kali menjadi legitimasi sosial untuk membatasi partisipasi perempuan dalam ruang publik. Sebagian masyarakat memahami teks keagamaan secara literal tanpa mempertimbangkan konteks historis dan tujuan syariat Islam yang menekankan keadilan dan kemaslahatan (Prastio et al., 2021). Akibatnya, perempuan menghadapi tantangan ganda, yaitu diskriminasi budaya dan pembatasan berbasis interpretasi agama.

Ketimpangan pendidikan dan struktur sosial-politik juga turut memengaruhi rendahnya representasi perempuan dalam kepemimpinan. Di beberapa wilayah, perempuan masih memiliki akses terbatas terhadap pendidikan dan pengembangan profesional sehingga menghambat kemampuan mereka untuk bersaing dalam dunia kerja dan kepemimpinan (Lutfiyah & Diyanah, 2022). Oleh karena itu, penyelesaian masalah kepemimpinan perempuan memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui



reformasi sosial, pendidikan, dan pemahaman keagamaan yang lebih inklusif.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, perkembangan globalisasi dan modernisasi memberikan pengaruh besar terhadap perubahan pola pikir masyarakat Muslim mengenai

kepemimpinan perempuan (Zakiyah & Arifin, 2021). Meningkatnya akses pendidikan, perkembangan teknologi informasi, dan keterlibatan perempuan dalam berbagai sektor publik mulai mengubah persepsi masyarakat terhadap kemampuan perempuan dalam memimpin.

Tabel 11. Perubahan Sosial yang Mendukung Kepemimpinan Perempuan

Aspek Perubahan	Bentuk Perubahan	Dampak terhadap Perempuan	Implikasi Sosial
Pendidikan	Akses pendidikan lebih luas	Peningkatan kompetensi perempuan	Kesempatan kepemimpinan meningkat
Teknologi informasi	Akses informasi global	Peningkatan kesadaran kesetaraan	Perubahan pola pikir masyarakat
Partisipasi ekonomi	Perempuan aktif bekerja	Kemandirian ekonomi perempuan	Peningkatan posisi sosial
Politik dan pemerintahan	Keterlibatan perempuan dalam kebijakan	Representasi perempuan meningkat	Kebijakan lebih inklusif
Gerakan sosial	Kampanye kesetaraan gender	Penguatan hak perempuan	Perubahan budaya sosial

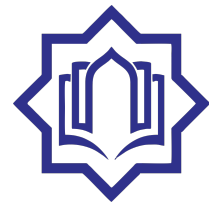
Berdasarkan Tabel 11, terlihat bahwa perubahan sosial modern memberikan peluang yang lebih besar bagi perempuan untuk memperoleh pengakuan dalam bidang kepemimpinan. Akses pendidikan yang semakin luas memungkinkan perempuan meningkatkan kapasitas intelektual, profesional, dan keterampilan kepemimpinan (Kana et al., 2022). Dalam masyarakat modern, pendidikan menjadi faktor penting yang menentukan kualitas sumber daya manusia tanpa membedakan gender.

Perkembangan teknologi informasi juga memainkan peran penting dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesetaraan gender. Informasi mengenai hak perempuan, kepemimpinan, dan

partisipasi publik dapat diakses secara luas sehingga masyarakat mulai terbuka terhadap peran perempuan dalam berbagai bidang (Aliyah & Aulia, 2022). Teknologi juga membantu perempuan membangun jaringan sosial dan profesional yang lebih luas.

Partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi turut meningkatkan posisi sosial perempuan dalam masyarakat. Perempuan modern tidak hanya berperan dalam rumah tangga, tetapi juga aktif sebagai profesional, pengusaha, akademisi, dan pemimpin organisasi (Shafira et al., 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki kemampuan untuk berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan sosial dan ekonomi.

Selain itu, keterlibatan perempuan



dalam politik dan pemerintahan memberikan pengaruh positif terhadap representasi kepentingan masyarakat secara lebih inklusif. Kehadiran perempuan dalam proses pengambilan keputusan memungkinkan munculnya kebijakan yang lebih sensitif terhadap isu sosial, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat (Maharani et al., 2024). Gerakan sosial mengenai kesetaraan gender juga membantu mengubah budaya masyarakat menuju

penerimaan yang lebih adil terhadap perempuan sebagai pemimpin.

Meskipun perubahan sosial mulai memberikan dampak positif, proses penerimaan kepemimpinan perempuan masih memerlukan upaya yang berkelanjutan. Pendidikan yang inklusif dan dialog keagamaan yang konstruktif menjadi langkah penting untuk membangun pemahaman masyarakat yang lebih moderat terhadap isu gender dan kepemimpinan dalam Islam.

Tabel 12. Strategi Penguatan Penerimaan Kepemimpinan Perempuan

Strategi	Bentuk Implementasi	Tujuan	Dampak yang Diharapkan
Pendidikan inklusif	Kesetaraan akses pendidikan	Meningkatkan kapasitas perempuan	Peningkatan kualitas kepemimpinan
Dialog keagamaan	Kajian Islam kontekstual	Mengurangi interpretasi diskriminatif	Pemahaman Islam lebih moderat
Pemberdayaan sosial	Pelatihan kepemimpinan perempuan	Meningkatkan partisipasi publik	Penguatan posisi sosial perempuan
Kebijakan pemerintah	Regulasi kesetaraan gender	Mendorong representasi perempuan	Kesempatan kepemimpinan lebih adil
Literasi masyarakat	Kampanye kesadaran gender	Mengurangi stereotip sosial	Penerimaan masyarakat meningkat

Tabel 12 menunjukkan bahwa penguatan penerimaan terhadap kepemimpinan perempuan membutuhkan strategi multidimensional yang melibatkan pendidikan, agama, sosial, dan kebijakan publik. Pendidikan inklusif menjadi langkah utama untuk memastikan bahwa perempuan memperoleh kesempatan yang sama dalam mengembangkan kompetensi dan keterampilan kepemimpinan (Baharun et al., 2021). Pendidikan tidak hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia perempuan, tetapi juga membantu membangun rasa percaya diri dan kemandirian sosial.

Dialog keagamaan yang konstruktif juga sangat penting dalam mengurangi interpretasi diskriminatif terhadap perempuan. Pendekatan Islam kontekstual yang menekankan nilai keadilan dan kemaslahatan dapat membantu masyarakat memahami bahwa kepemimpinan perempuan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam (Moghadam, 2002). Oleh karena itu, peran ulama, akademisi, dan tokoh masyarakat sangat penting dalam membangun wacana Islam yang moderat dan inklusif.

Pemberdayaan sosial melalui pelatihan kepemimpinan dan peningkatan partisipasi perempuan



dalam organisasi sosial dapat memperkuat kapasitas perempuan dalam ruang publik. Di sisi lain, dukungan kebijakan pemerintah juga diperlukan untuk menciptakan kesempatan yang lebih adil bagi perempuan dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan politik.

Selain itu, peningkatan literasi masyarakat mengenai kesetaraan gender menjadi langkah strategis untuk mengurangi stereotip sosial terhadap perempuan. Kesadaran masyarakat yang lebih baik mengenai pentingnya partisipasi perempuan akan membantu menciptakan lingkungan sosial yang lebih inklusif dan mendukung kepemimpinan perempuan (Da Meisa & Anzari, 2021). Dengan demikian, tantangan terhadap kepemimpinan perempuan dalam masyarakat Muslim dapat diatasi secara bertahap melalui pendekatan pendidikan, sosial, budaya, dan keagamaan yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan bersama.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan perempuan dalam perspektif Islam kontemporer pada dasarnya memperoleh legitimasi yang kuat melalui pendekatan keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan yang menjadi nilai fundamental ajaran Islam. Konsep kepemimpinan dalam Islam tidak semata-mata dipahami sebagai bentuk kekuasaan, melainkan sebagai amanah dan tanggung jawab moral yang harus dijalankan berdasarkan integritas,

kompetensi, keadilan, serta kemampuan dalam memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam konteks tersebut, gender bukanlah faktor utama yang menentukan kelayakan seseorang menjadi pemimpin, melainkan kualitas individu dalam menjalankan fungsi kepemimpinan secara efektif dan bertanggung jawab.

Prinsip kesetaraan dalam Islam menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama sebagai hamba Allah Swt. dan khalifah di bumi. Al-Qur'an menegaskan bahwa kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh ketakwaan dan amal saleh. Oleh karena itu, perempuan memiliki hak dan kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, pendidikan, ekonomi, politik, maupun kepemimpinan. Perkembangan pemikiran Islam kontemporer juga memperlihatkan adanya reinterpretasi terhadap teks-teks keagamaan yang sebelumnya dipahami secara patriarkal menuju pemahaman yang lebih kontekstual, inklusif, dan berorientasi pada prinsip keadilan sosial.

Penelitian ini juga menemukan bahwa argumentasi yang mendukung kepemimpinan perempuan dalam Islam didasarkan pada prinsip kompetensi, kemaslahatan, serta tujuan syariat Islam (maqashid al-syariah). Para intelektual Muslim kontemporer menekankan bahwa kepemimpinan seharusnya diberikan kepada individu yang memiliki kapasitas, integritas, dan kemampuan terbaik tanpa diskriminasi gender. Sejarah Islam sendiri



menunjukkan adanya keterlibatan aktif perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, ekonomi, sosial, dan politik, yang membuktikan bahwa perempuan memiliki kapasitas intelektual dan kepemimpinan yang signifikan.

Meskipun demikian, perempuan masih menghadapi berbagai tantangan dalam memperoleh posisi kepemimpinan di masyarakat Muslim. Budaya patriarki, stereotip gender, perbedaan interpretasi terhadap teks keagamaan, serta ketimpangan sosial masih menjadi hambatan utama terhadap penerimaan kepemimpinan perempuan. Namun, perkembangan pendidikan, globalisasi, teknologi informasi, serta meningkatnya partisipasi perempuan dalam ruang publik mulai mendorong perubahan pola pikir masyarakat menuju penerimaan yang lebih inklusif terhadap perempuan sebagai pemimpin.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa Islam pada dasarnya memberikan ruang yang luas bagi perempuan untuk menjadi pemimpin selama memiliki kompetensi, integritas, dan kemampuan dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan melalui pendidikan yang inklusif, dialog keagamaan yang konstruktif, serta penguatan kesadaran sosial untuk menciptakan sistem sosial yang lebih adil dan setara dalam memberikan kesempatan kepemimpinan bagi laki-laki maupun perempuan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam

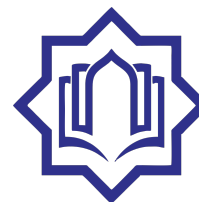
memperkaya diskursus Islam kontemporer mengenai kepemimpinan perempuan serta menjadi referensi dalam pengembangan kajian Islam yang lebih moderat, humanis, dan relevan dengan dinamika masyarakat modern.

Daftar pustaka

- Abou-Bakr, O. (2015). The interpretive legacy of Qiwamah as an exegetical construct. *Men in Charge? Rethinking Authority in Muslim Legal Tradition*. Oneworld Publications.
- Affandi, N. R. D., Hartawan, Y., & Aqilah, L. A. (2022). Gaya Komunikasi Kepemimpinan Perempuan. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(2), 249-257.
- Al Ahsani, N. (2020). Kepemimpinan perempuan pada masyarakat dalam perspektif Sa'īd Ramaḍān Al-Būṭī (telaah hadis misoginis). *Al-Hikmah*, 18(1), 51-66.
- Aliyah, S. A., & Aulia, R. S. (2022). Metode Qira'ah Mubadalah Pada Kasus Kepemimpinan Perempuan. *An-Nida'*, 46(2), 174-191.
- Arsal, A., Busyro, B., & Imran, M. (2020). Kepemimpinan Perempuan: Penerapan Metode Tafsir Hermeneutika Feminisme Amina Wadud. *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 4(2), 481-500.
- Aulia, H. (2023). Kepemimpinan perempuan dalam lembaga pendidikan Islam (studi kasus di pondok pesantren Syaikh Zainuddin NW Anjani). *MANAZHIM: Jurnal Manajemen Dan Ilmu Pendidikan*.
- Badran, M. (2005). Between secular and Islamic feminism/s: Reflections on the Middle East and beyond. *Journal of Middle East Women's Studies*, 1(1), 6-28.



- <https://doi.org/10.2979/MEW.2005.1.1.6>
- Baharun, H., Wibowo, A., & Hasanah, S. N. (2021). Kepemimpinan perempuan dalam menciptakan sekolah ramah anak. *Quality*, 9(1), 87-102.
- Balkis, A. H. (2020). Gaya Kepemimpinan Perempuan Dalam Instansi Publik: Studi Kasus Susi Pudjiastuti. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 8(1), 79-88.
- Barlas, A. (2006). Women's readings of the Qur'an. *International Journal of Middle East Studies*, 39(2), 255-257. <https://doi.org/10.1017/S0020743807070515>
- Budiarta, I. W. (2022). Kepemimpinan Perempuan dalam Sistem Keperabatan Purusa: Legitimasi Sejarah atas Kepemimpinan Politik Perempuan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 8(1), 23-33.
- Chairunnisa, M. R. (2022). Kepemimpinan Perempuan Dalam Hermeneutika Feminisme Amina Wadud. *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 8(2), 32-41.
- Da Meisa, E. A., & Anzari, P. P. (2021). Perspektif feminisme dalam kepemimpinan perempuan di Indonesia. *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial (JIHI3S)*, 1(6), 711-719.
- Famelasari, R., & Prastiwi, J. H. (2021). Kepemimpinan Perempuan dan Tata Kelola Tambang di Bojonegoro. *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 126-147.
- Hartati, Z., Erawati, D., Yusup, S., Jennah, R., Mahfudz, R., & Rosidi, I. (2025). *Perempuan, Remaja dan Keluarga dalam Gerak Langkah Kehidupan di Era Globalisasi: Bunga Rampai*. Penerbit K-Media.
- Kana, R. P., Indriani, E., & Lubis, M. J. (2022). Kepemimpinan perempuan sebagai kepala sekolah. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(1), 4591-4598.
- Khairi, A., Giatman, M., Maksum, H., Jalinus, N., & Abdulah, R. (2023). Menepis Stereotipe Gender Melalui Kepemimpinan Perempuan Di Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 16(6), 2451-2461.
- Khairunnas, M., Daulay, H., & Saladin, T. I. (2022). Kepemimpinan Perempuan Aceh. *PERSPEKTIF*, 11(4), 1559-1568.
- Kyra, A., & Winduwati, S. (2024). Gaya Kepemimpinan Perempuan Pemimpin dalam Membangun Reputasi Perusahaan Mentari Group. *Koneksi*, 8(1), 245-253.
- Latifah, H., & Asy'ari, H. (2024). Peran Kepemimpinan Perempuan dalam Pengembangan Manajemen Pendidikan Islam: The Role of Women's Leadership in the Development of Islamic Education Management. *Thawalib: Jurnal Kependidikan Islam*, 5(2), 463-472.
- Lutfiyah, L., & Diyanah, L. (2022). Kepemimpinan Perempuan Dalam Al-Qur'an Kajian Tafsir Tematik. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 5(2), 270-287.
- Maharani, I. S., Nugraha, A., & Pratama, R. K. (2024). Optimalisasi peran kepemimpinan perempuan dalam membangun kesetaraan gender. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 5(3), 3042-3048.
- Mir-Hosseini, Z. (2006). Muslim women's quest for equality: Between Islamic law and feminism. *Critical Inquiry*, 32(4), 629-645. <https://doi.org/10.1086/508085>
- Moghadam, V. M. (2002). Islamic feminism and its discontents: Toward a resolution of the debate. *Sigms: Journal of Women in Culture*



- and Society*, 27(4), 1135-1171.
<https://doi.org/10.1086/339639>
- Musa, A. E. Z., Latiep, I. F., Herlina, A., Toatubun, M., & Furwanti, R. (2023). *Peran kepemimpinan perempuan dalam birokrasi*. Nas Media Pustaka.
- Muslimah, I. R. (2021). Kepemimpinan perempuan dalam mengembangkan budaya organisasi. *Jurnal Kependidikan Islam*, 11(2), 198-207.
- Nurchayani, N. P., Zahra, C. S. A., Humaira, A., & Ummah, A. (2024). Kepemimpinan Perempuan: Analisis Androgini Dalam Kepemimpinan Retno Marsudi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 3178-3192.
- Prastio, L. O., Abdillah, A., Nurlia, E., & Tati, T. (2021). Kepemimpinan Perempuan di Pemerintah Daerah: Kajian Kepemimpinan Perempuan Walikota Tangerang Selatan. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 3(2), 103-114.
- Putri, D. N., Taufiq, W., & Izzan, A. (2024). Kepemimpinan Perempuan dalam Tafsir At-Tabari dan Tafsir Al-Mishbāh. *Mashadiruna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 3, 61-74.
- Rahmatunnur, S., Aramina, A., & Cholil, M. (2023). Pandangan Fatima Mernissi tentang kepemimpinan perempuan di wilayah publik perspektif teori Feminisme Eksistensial. *Egalita: Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, 18(1).
- Rumahorbo, L., Kathryn, S., & Rajagukguk, J. S. (2021). Pengaruh Keterampilan Interpersonal Terhadap Efektivitas Kepemimpinan Perempuan. *Matheo: Jurnal Teologi/Kependetaan*, 11(2), 208-220.
- Saeful, A. (2021). Kepemimpinan Perempuan Dalam Hukum Islam: Telaah Atas Hadist Kepemimpinan Perempuan. *Syarie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 4(2), 108-124.
- Shafira, S., Maryam, M., & Kurniati, K. (2024). Tantangan dan Peluang Kepemimpinan Perempuan dalam Masyarakat Perspektif Hukum Islam. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 4(1), 291-299.
- Siahaan, T., Terminanto, A. A., Haryanti, E., Harini, H., & Perkasa, D. H. (2024). Peran Kepemimpinan Perempuan dalam Meningkatkan Keberagaman dan Inklusivitas di Perusahaan Asuransi. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4(5), 2329-2341.
- Siahaan, T., Terminanto, A. A., Haryanti, E., Harini, H., & Perkasa, D. H. (2024). Peran Kepemimpinan Perempuan dalam Meningkatkan Keberagaman dan Inklusivitas di Perusahaan Asuransi. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4(5), 2329-2341.
- Surahman, S., & Munadi, M. (2022). Kepemimpinan Perempuan Di Perguruan Tinggi: Manajerial Atau Akademik. *Jurnal Kepemimpinan Dan Pengurusan Sekolah*, 7(1), 18-26.
- Zahra, E. F. (2020). Kepemimpinan Perempuan Di Balik Bayang-Bayang Patriarki. *International Journal Of Demos*, 2(1).
- Zakiyah, Z., & Arifin, Z. (2021). Pendekatan mubādalah perspektif faqihuddin abdul kodir dalam pemaknaan hadis kepemimpinan perempuan. *Riwayah*, 7(2), 347-366.